



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 04 Desember 2017

Halaman: 2

Anggaran Jamkesda 2018 Berkurang

UMBULHARJO (MERAPI) - Anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Yogyakarta tahun 2018 berkurang dibandingkan tahun 2017. Dari anggaran Rp 20 miliar di APBD 2017 menjadi Rp 12,5 miliar dalam APBD 2018. Pengurangan itu karena sebagian anggaran Jamkesda dialihkan untuk premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN BPJS) Kesehatan.

"Memang anggaran Jamkesda turun karena dialihkan untuk membayarkan premi penduduk kota yang diikutkan sebagai peserta PBI daerah JKN," kata Kepala Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta Umi Nur Chariyati, Minggu (3/12).

Umi mengutarakan, Pemkot Yogyakarta mengalokasikan Rp 8,6 miliar untuk membayar premi PBI daerah JKN BPJS Kesehatan tahun 2018. Peserta premi PBI daerah misalnya warga miskin pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) di Kota Yogyakarta. Alokasi dana Jamkesda itu dari pengalihan anggaran yang pada tahun-tahun sebelumnya untuk Jamkesda. Oleh sebab itu alokasi jasa perawatan Jamkesda tahun 2018 dikurangi menjadi Rp 12,5 miliar.

Besaran alokasi Jamkesda itu mempertimbangkan serapan Jamkesda di tahun 2017 yang turun. Kondisi itu dipengaruhi sebagian besar masyarakat di Kota Yogyakarta telah menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan. Sampai akhir November 2017, Dinkes Kota Yogyakarta mencatat, serapan anggaran Jamkesda Rp 11,7 miliar. Sedangkan untuk pembayaran premi PBI daerah tahun 2017 Rp 3,4 miliar. "Seluruh pemegang KMS tahun 2017 sudah didaftarkan BPJS kesehatan. Tapi Jamkesda tetap dianggarkan karena program ini masih ada di tahun 2018," ujarnya.

Sesuai ketentuan pemerintah mulai tahun 2019 seluruh program jaminan kesehatan harus diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan. Begitu pula dengan Jamkesda Pemkot Yogyakarta akan diintegrasikan BPJS Kesehatan. Meskipun Jamkesda Kota Yogyakarta di tahun 2019 ditiadakan, tapi pengakses Jamkesda dari pemegang KMS tetap dijamin lewat PBI daerah JKN BPJS Kesehatan. Selama ini Pemkot Yogyakarta setiap bulan memiliki tanggungan premi bagi 11.186 PBI BPJS Kesehatan yang dibayarkan dengan APBD Kota Yogyakarta.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardianto mengatakan, dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2018 telah disepakati sebelum terjadi integrasi Jamkesda ke JKN BPJS pada 2019, maka pada tahun anggaran 2018 program Jamkesda masih dianggarkan dalam APBD. Ditambahkan, di dalamnya anggaran itu sudah termasuk anggaran untuk Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar Rp 1,5 miliar.

"Jamkesda ini bisa diakses seluruh masyarakat ber-KTP Kota Yogyakarta, tapi tidak sebagai peserta JKN BPJS aktif," tandas Fokki.

(Tri)-m

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input checked="" type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005